



PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG




# RENCANA KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG



# 2025



## Lokasi

 Jl. Raya Lasem No.KM.4, Kaliuntu,  
Pasarbanggi, Kec. Rembang,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah  
59219

## Hubungi Kami

 (0295) 6999095  
 [dinhub@rembangkab.go.id](mailto:dinhub@rembangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat *Allah Subhana Wa Ta'ala*, kami dapat menyusun Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Renja memuat evaluasi hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Kami berharap dengan selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, dapat memberikan nilai bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Rembang



**Drs. DRUPODO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19719670421 199303 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS</b>	
<b>PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU.....</b>	<b>11</b>
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang .....	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	59
<b>BAB III TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR</b>	
<b>SASARAN, DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025.....</b>	<b>71</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	71
3.2 Tujuan, Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang..	73
3.2.1. Tujuan OPD.....	73
3.2.2. Indikator Tujuan OPD.....	73
3.2.3. Sasaran OPD .....	73
3.2.4. Indikator Sasaran OPD .....	73
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Program Kegiatan Tahun 2024.....	77
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rembang.....	12
Tabel 2. 2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2023.....	21
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	33
Tabel 2. 4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang .....	35
Tabel 2. 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Rembang .....	61
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.....	75
Tabel 4. 1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

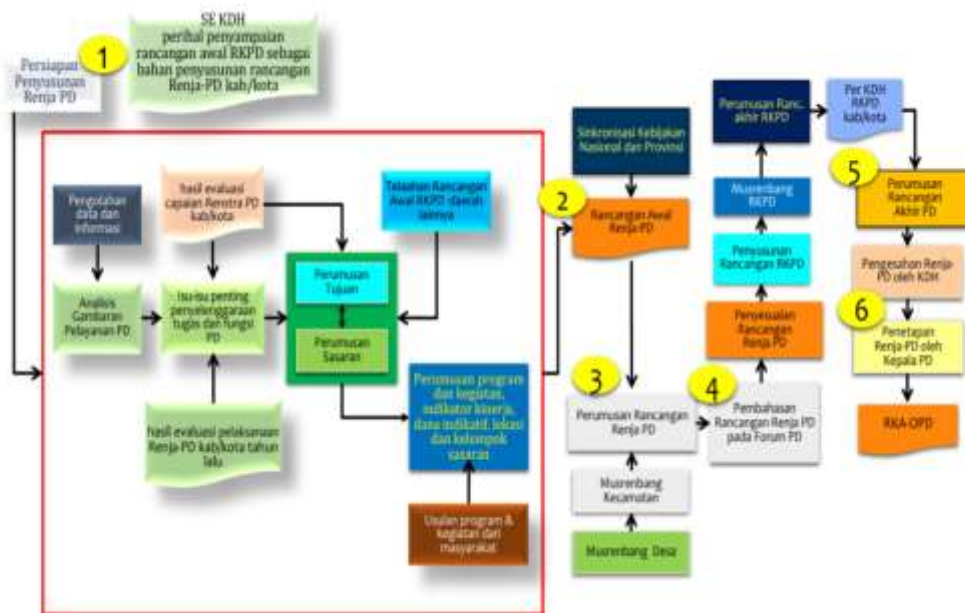
Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan . Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukandalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja

Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Sedangkan untuk alur proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

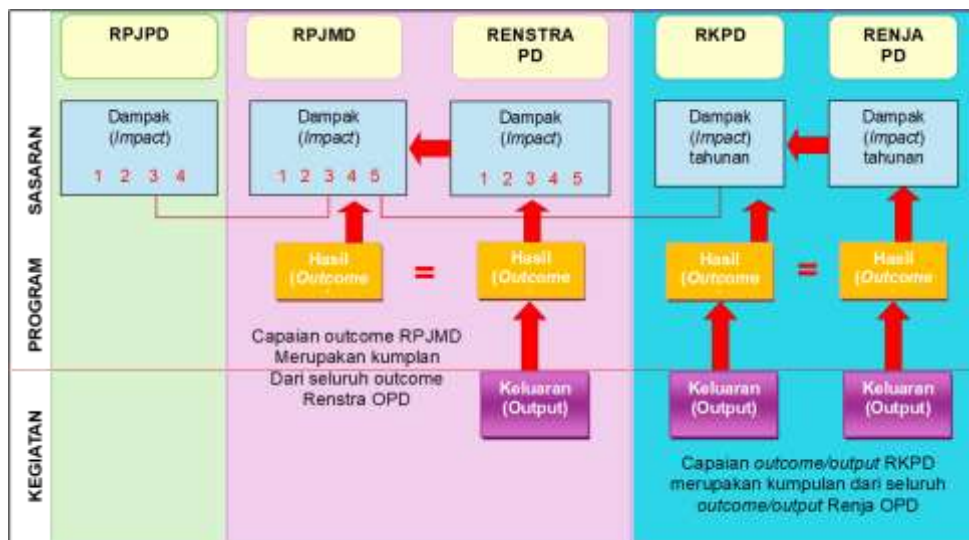


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang selaku salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang berkewajiban dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dengan bersumber pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 serta evaluasi renja tahun lalu.

**Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2025.

Tujuannya adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2025.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023**

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025
  - 3.2.1. Tujuan
  - 3.2.2. Indikator Tujuan
  - 3.2.3. Sasaran
  - 3.2.4. Indikator Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

**2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023**

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasaran.

Pada tahun anggaran 2023 total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sejumlah Rp. 22.318.303.718,- Jumlah dana tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dari total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dana yang terserap untuk membiayai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 21.655.114.684,- atau sebesar 97,03%.

Capaian kinerja selama tahun yang berlalu akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk urusan Bidang Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

Tabel 2.1 / Tabel T- C.29 (Permendagri 86 Tahun 2017) Rekapitulasi  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian  
Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2023

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rembang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6) * 100	9	10	11 = (10/4)	
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>														
2														
2	1													
	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	73,00		<b>70</b>			<b>71</b>		
						<b>Nilai IKM OPD</b>	88,30	77,563	<b>83,76</b>			<b>85,26</b>		
2	15	1	02		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2 Program, 12 Indikator, 11 kegiatan, 12 indikator kegiatan	4	4	100	<b>4 Dokumen</b>	4	1
2	15	1	02	1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2	2	2	100	2 Dokumen	2	

2	15	1	02 .0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	2	1	50	1 Laporan	1	
2	15	1	02 .0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	4	4	100	4Laporan	4	
2	15	1	02 .0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1 Dokumen	1	1	100	1 Dokumen	1	1
2	15	1	02 .0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60	60	60	100	60 Orang/bulan	60	
2	15	1	02 .0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	4	4	100	12 Dokumen	12	
2	15	1	02 .0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	1	02 .0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	2	0				0	0	0
2	15	1	02 .0 3	6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen administrasi BMD dikelola dengan baik		0				0		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD						0		
2	15	1	02 .0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	2	0	2	0	0	2sub kegiatan	2	
2	15	1	02 .0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	0	0		110 unit	110	

2	15	1	02 .0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	0	0		110 Paket	110	
2	15	1	02 .0 5	3		Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian dikelola dengan baik		0	0	0		0		
2	15	1	02 .0 5	9		% ASN yang mengikuti diklat teknis		0	0	0		0		
2	15	1	02 .0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	9	12 Pekerjaan	8	8	100	9sub kegiatan		
2	15	1	02 .0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	20	13	65	20 paket	20	
2	15	1	02 .0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	5	4	80	5 Paket	5	
2	15	1	02 .0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		30	26	22	84,615	26 paket	26	
2	15	1	02 .0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10	4	2	50	4 Paket	4	
2	15	1	02 .0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	2	2	100	2 Paket	2	
2	15	1	02 .0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	1	1	100	12 Dokumen	12	
2	15	1	02 .0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		60	60	60	100	60 paket	60	
2	15	1	02 .0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	10	83,333	12 Laporan	12	

2	15	1	02 .0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	9	9	1	1	100	9 sub kegiatan	9	1
2	15	1	02 .0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	0	0		3 unit	3	
2	15	1	02 .0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9	6	6	100	8 unit	8	
2	15	1	02 .0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	3	12	3	3	100	3 sub kegiatan	3	1
2	15	1	02 .0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	12	12	100	12 Laporan	12	
2	15	1	02 .0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	12	12	100	12 Laporan	12	
2	15	1	02 .0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12 Laporan	12	
2	15	1	02 .0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	6	20	6	3	50	6 sub kegiatan	6	1
2	15	1	02 .0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3	37	24	64,8648 6486	37 Unit	37	
2	15	1	02 .0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	10	7	70	10 unit	10	

2	15	1	02 .0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	1	1	100	2 unit	2	
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	100	42,857	42,86	57,13	133,294	57,14	57,14	0,5714
						Persentase kendaraan laik jalan	77,96	19,802	25,84	21,31	82,469	46,68	46,68	0,598
						Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	100	20	50	10	20	60	60	0,6
						Persentase Lalu lintas berkeselamatan	93	21,66667	53	51,67	97,4905	70	70	0,7526
						Persentase terminal dan parkir yang terkelola	35	26,6667	35	35	100	35	35	1
						presentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	20	0	20	0	0	20	20	1
						Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	20	40	20	20	100	20	20	1
2	15	2	02 .0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4	0	2	0	0	3 kali	3	0,75
2	15	2	02 .0 1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	1	0	0	1Dokumen	1	
2	15	2	02 .0 1	3	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	0	0		Dokumen	1	
2	15	2	02 .0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	7	3	7	0	0	7 Macam	7	1

						Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara	7	7	7	0	0	7 Macam	7	1
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		0	0	0	#DIV/0!	Unit		
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1931	513	438	85,3801	1437 Unit	1437	
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1039	748	874	116,844	Unit		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						1039 Unit	1039	
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	3	2 terminal	3	3	100	3 terminal	3	
2	15	2	02.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1	1	1	100	1Unit	1	
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		3	1	1	100	2 Unit	2	
2	15	2	02.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3	1	1	100	12 Orang	12	
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	2	1	1	100	3	3	

2	15	2	02 .0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		2	1	1	100	1 laporan	1	
2	15	2	02 .0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	2514	1926	2514	5929	235,839	4540	4540	1,805
2	15	2	02 .0 5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		1	3	0	0	7 Unit	7	
2	15	2	02 .0 5	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2	0	0	#DIV/0!	7 Orang	7	
2	15	2	02 .0 5	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		5929	9.823	5289	53,8430	9823 Unit	9823	
2	15	2	02 .0 5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		4900	5.000	3.032	60,64	1 Dokumen	1	
2	15	2	02 .0 5	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3	2	0	0	2 Laporan	2	
2	15	2	02 .0 5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		12	10	10	100	4 Unit	4	
2	15	2	02 .0 5	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	2	0	0	1 Laporan	1	

2	15	2	02 .0 5	1 0	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	2	2	100	2 Laporan	2	
2	15	2	02 .0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	2	3	2	66,6667	3	3	0,75
2	15	0 2	02 :0 6	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2	0		1 Laporan	1	
2	15	2	02 .0 6	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1	2	2	100	140 unit	140	
2	15	2	02 .0 6	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		222	5	5	100	400 Laporan	400	
2	15	2	02 .0 6	5	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		16	0	0		3 laporan	3	
2	15	2	02 .0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	4	1	2	2	100	3 kali	3	0,75
2	15	2	02 .0 7	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0	1	2	200	4 Dokumen	4	

2	1	2	02	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0	5	0	0	2 Orang	2	
2	1	2	02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		1	0	0		4Laporan	4	
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			0	0		4Laporan	4	
2	1	2	02		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	4	2	2	100	2	2	1
2	1	2	02	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1	5	0	0			
2	1	2	02	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		3	1	1	100			
2	1	2	02	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		2	1	1	100			

**Tabel 2. 2**

**Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2023**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>												
<b>2</b>												
<b>2</b>	<b>15</b>					<b>22.318.303.718</b>	<b>21.655.114.684</b>	97,02				
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>70</b>	70,15	100,21	<b>18.600.896.137</b>	<b>18.159.041.949</b>	97,62
						<b>Nilai IKM OPD</b>	<b>83,76</b>	78,92	94,22			
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	1.350.000	1.350.000	100
2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	1.350.000	1.350.000	100
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	50	-		

2	15	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	-		
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100	4.682.476.655	4.490.327.043	95,896
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	60	100	4.591.246.655	4.400.897.043	96
2	15	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	100	90.930.000	89.130.000	98
2	15	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	300.000	300.000	100
2	15	1	02.03			Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	0	0		-	-	
2	15	1	02.03	6		Jumlah Dokumen administrasi BMD dikelola dengan baik	0	0		-	-	
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	2	0	0	-	-	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	-	-	
2	15	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	-	-	
						Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian dikelola dengan baik	0	0	0	-	-	
						% ASN yang mengikuti diklat teknis	0	0	0	-	-	

2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	8	8	100	200.472.682	164.620.586	82,116
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	13	65	4.500.000	3.127.500	69,5
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	4	80	8.000.000	3.350.000	41,875
2	15	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26	22	84,615	18.000.000	15.863.900	88,132
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	2	50	26.000.000	20.926.500	80,486
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100	19.228.000	16.909.600	87,942
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100	5.000.000	3.160.000	63,2
2	15	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	60	100	20.478.000	20.107.000	98,188
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10	83,333	99.266.682	81.176.086	81,775
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	1	1	100	67.350.000	40.600.000	60,282
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		-	-	0
2	15	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	100	67.350.000	40.600.000	60,282

2	15	1	02.07	10		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		
2	15	1	02.07	11		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	3	3	100	13.529.470.800	13.371.472.820	98,832
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	4.000.000	2.081.500	52,037
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	12.573.996.000	12.459.898.495	99,092
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	951.474.800	909.492.825	95,587
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	6	3	50	119.776.000	90.671.500	75,700
2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37	24	64,864	104.849.000	82.427.500	78,615
2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	7	70	13.890.000	7.380.000	53,131
2	15	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	1.037.000	864.000	83,317

2	15	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten</b>	<b>42,86</b>	57,13	133,295	<b>3.717.407.581</b>	<b>3.496.072.735</b>	94,045
						<b>Persentase kendaraan laik jalan</b>	<b>25,84</b>	21,31	82,469			
						<b>Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan</b>	<b>50</b>	10	20			
						<b>Persentase Lalu lintas berkeselamatan</b>	<b>53</b>	51,67	97,490			
						<b>Persentase terminal dan perparkiran yang terkelola</b>	<b>35</b>	35	100			
						<b>presentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana</b>	<b>20</b>	0	0			
						<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>20</b>	20	100			
2	15	2	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	0		-	-	
2	15	2	02.01	1		<i>Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota</i>	1	0		-	0	
2	15	2	02.01	3		<i>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	0	0		-	0	
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	7	0	0	2.413.463.041	2.324.834.871	96,327

						Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara	7	0	0			
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	513	438	85,381	1.824.170.500	1.824.170.500	100
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	748	874	116,845	589.292.541	500.664.371	84,960
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	3	3	100	224.413.250	221.141.414	98,542
2	15	2	02.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				-	0	
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan pengembangannya	1	1	100	53.899.700	53.899.449	99,999
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1	1	100	136.933.550	133.662.125	97,610
2	15	2	02.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1	1	100	33.580.000	33.579.840	99,999
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	1	100	36.613.490	36.612.780	99,998

2	15	2	02.04	1	<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	3	0	0	-	0	
2	15	2	02.04	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1	1	100	36.613.490	36.612.780	99,998
2	15	2	02.05		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah kendaraan yang diuji</i>	2514	5929	235,840	318.265.000	214.674.100	67,451
2	15	2	02.05	1	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	3	0	0	-	0	
2	15	2	02.05	2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	0	0		-	0	
2	15	2	02.05	3	<i>Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	9.823	5289	53,843	66.620.000	66.618.100	99,997
2	15	2	02.05	4	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	5.000	3.032	60,64	66.495.000	66.494.500	99,999
2	15	2	02.05	5	<i>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	2	0	0	-	0	

2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10	10	100	175.000.000	71.914.500	41,094
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	0	0	-	0	
	15	2	02.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2	100	10.150.000	9.647.000	95,045
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	2	66,667	717.934.000	692.412.270	96,445
2	15	02	02:06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	0	0	-		
2	15	2	02.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	2	100	13.814.000	13.814.000	100
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5	5	100	704.120.000	678.598.270	96,375
2	15	2	02.06	5	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	0		-	0	
2	15	2	02.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2	2	100	-	-	
2	15	2	02.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1	2	200	-	0	

2	15	2	02.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	5	0	0	-	0	
2	15	2	02.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0		-	0	
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	0	0				
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	2	100	-	-	
2	15	2	02.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	5	0	0	-	0	
2	15	2	02.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	1	100	-	0	
2	15	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	1	100	-	0	
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	6.718.800	6.397.300	95,214
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,	2	1	50	6.718.800	6.397.300	95,214

2	15	2	02.09	2	<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</i>	<i>Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</i>	0	0			-		
2	15	2	02.11		<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	0	0		-		0
2	15	2	02.11	1	<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	0	0		-		0
2	15	2	02.11	2	<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0			-		0
2	15	2	02.11	3	<i>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0			-		0
2	15	2	02.14		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0			-		0
2	15	2	02.14	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0	0			-		0

2	15	2	02.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0			-		
2	15	2	02.16	1	<i>Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>"Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota "</i>	0	0			-		
2	15	2	02.16	2	<i>Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0			-		
2	15	2	02.16	3	<i>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>"Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota "</i>	0	0			-		

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang**

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perhubungan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas.
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya untuk memastikan perencanaan bidang perhubungan dapat berjalan optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

### **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Analisis kinerja merupakan suatu perwujudan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, yang dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Target renstra sampai akhir tahun 2023 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2023 untuk IKK dan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Berdasarkan Tabel 2.3 / Tabel T-C.30. (Permendagri 86 Tahun 2017) tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator seperti termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Perhubungan Kabupaten Rembang secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas**  
**Perhubungan Kabupaten Rembang**

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Capaian		Tahun	Tahun	
						2022	2023			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Indeks Konektivitas	28,07	36,35	46,71	62,25	28,07	37,69	62,25	71,62	
1	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	28,57	42,86	57,14	85,71	28,57	57,14	85,71	100	
2	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	27,34	35,84	47,17	63,21	27,34	32,28	63,21	71,7	
3	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas	28,58	30,69	36,3	38,48	28,58	23,65	38,48	43,9	

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang**

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi aparatur SDM perhubungan yang handal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan;
2. Masih kurangnya pengelolaan dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang;
4. Masih kurangnya dukungan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan;
5. Kurangnya informasi kepada masyarakat melalui peningkatan fasilitas pendukung yang telah ada agar tercipta pelayanan operasional yang optimal;
6. Belum adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penjabaran review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Banyak usulan kegiatan atau pekerjaan yang diajukan masih pada lokasi yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu pada Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa sesuai lampiran SK. Bupati tentang jalan kabupaten dan jalan poros desa, padahal program atau kegiatan yang sama sudah dilakukan di tempat tersebut di tahun sebelumnya.
2. Keinginan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan peningkatan insfrastruktur bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan.
3. Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang nampaknya kurang dimengerti oleh sejumlah pihak terkait, sehingga usulan kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan lokasi sering terjadi diluar kewenangan.

**Tabel 2. 4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>											
					<b>30.418.000.000</b>					<b>30.418.000.000</b>	
<b>X.XX.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Remb ang	Nilai SAKIP OPD	<b>72</b>	22.423.000.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Remb ang	Nilai SAKIP OPD	<b>72</b>	22.423.000.000	
		Remb ang	IKM	<b>86,76</b>			Remb ang	IKM	<b>86,76</b>		
<b>X.XX.1.2 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Remb ang	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>4 Doku men</b>	50.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Remb ang	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>4 Doku men</b>	50.000.000	
X.XX.1.2 01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Remb ang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Remb ang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	15.000.000	

X.XX.1.2 01.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
X.XX.1.2 01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	
X.XX.1.2 01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	
<b>X.XX.1.2 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>1 Dokumen</b>	5.290.000.000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>1 Dokumen</b>	5.290.000.000	
X.XX.1.2 02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang / bulan	5.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang / bulan	5.000.000.000	
X.XX.1.2 02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.000.000	

X.XX.1.2 02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	
<b>X.XX.1.2 06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	<b>12 laporan</b>	398.000.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	<b>12 laporan</b>	398.000.000	
X.XX.1.2 06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	10.000.000	
X.XX.1.2 06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	
X.XX.1.2 06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	20.000.000	
X.XX.1.2 06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	
X.XX.1.2 06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	65.000.000	

X.XX.1.2 06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.000.000	
X.XX.1.2 06.7	Penyediaan Bahan/Material	Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 paket	40.000.000	
X.XX.1.2 06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
<b>X.XX.1.2 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	<b>1 unit</b>	200.000.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	<b>1 unit</b>	200.000.000	
X.XX.1.2 07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	200.000.000	
<b>X.XX.1.2 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	<b>12 laporan</b>	16.210.000.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	<b>12 laporan</b>	16.210.000.000	
X.XX.1.2 08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	

X.XX.1.2 08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000.000	
X.XX.1.2 08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		
X.XX.1.2 08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	
<b>X.XX.1.2 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	<b>20 unit</b>	275.000.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	<b>20 unit</b>	275.000.000	
X.XX.1.2 09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rembang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rembang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		

X.XX.1.2 09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	200.000.000	
X.XX.1.2 09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rembang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rembang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		
X.XX.1.2 09.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rembang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rembang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		
X.XX.1.2 09.5	Pemeliharaan Mebel	Rembang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Mebel	Rembang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		
X.XX.1.2 09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000	
X.XX.1.2 09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		
X.XX.1.2 09.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rembang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rembang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		

X.XX.1.2 09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	
X.XX.1.2 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		
X.XX.1.2 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		
X.XX.1.2 09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rembang	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rembang	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha		
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	Rembang				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	Rembang				
<b>2.15.2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rembang	<b>Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>85,71 %</b>	7.995.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rembang	<b>Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>85,71 %</b>	7.995.000.000	
		Rembang	<b>Persentase kendaraan laik</b>	<b>56,78 %</b>			Rembang	<b>Persentase kendaraan laik</b>	<b>56,78 %</b>		

			<b>jalan</b>					<b>jalan</b>			
		Rembang	<b>Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan</b>	<b>100%</b>			Rembang	<b>Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan</b>	<b>100%</b>		
		Rembang	<b>Persentase Terminal dan parkir yang dikelola</b>	<b>35,00%</b>			Rembang	<b>Persentase Terminal dan parkir yang dikelola</b>	<b>35,00%</b>		
		Rembang	<b>Persentase Lalulintas berkeselamatan</b>	<b>76,6%</b>			Rembang	<b>Persentase Lalulintas berkeselamatan</b>	<b>76,6%</b>		
		Rembang	<b>Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana</b>	<b>20,00%</b>			Rembang	<b>Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana</b>	<b>20,00%</b>		
		Rembang	<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>20,00%</b>			Rembang	<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>20,00%</b>		
<b>2.15.2.2 01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<b>3 kali</b>	200.000.000	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<b>3 kali</b>	200.000.000	
2.15.2.20 1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	

2.15.2.20 1.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.15.2.20 1.7	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan		
<b>2.15.2.2 02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	<b>7 Macam</b>	4.800.000.000	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	<b>7 Macam</b>	4.800.000.000	
2.15.2.20 2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		
2.15.2.20 2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1540 unit	3.900.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1540 unit	3.900.000.000	
2.15.2.20 2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		
2.15.2.20 2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang	748 unit	900.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang	748 unit	900.000.000	

	Jalan		Terehabilitasi dan Terpelihara			Jalan		Terehabilitasi dan Terpelihara			
<b>2.15.2.203</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	<b>3 Terminal</b>	295.000.000	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	<b>3 Terminal</b>	295.000.000	
2.15.2.203.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen		
2.15.2.203.2	Pembangunan Gedung Terminal	Rembang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		Pembangunan Gedung Terminal	Rembang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		
2.15.2.203.9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	80.000.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	80.000.000	
2.15.2.203.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rembang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	180.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rembang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	180.000.000	
2.15.2.203.10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	12 Orang	35.000.000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	12 Orang	35.000.000	

<b>2.15.2.2 04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<b>3 Kali</b>	150.000.000	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<b>3 Kali</b>	150.000.000	
2.15.2.20 4.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		
2.15.2.20 4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	
<b>2.15.2.2 05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Rembang	Jumlah kendaraan yang diuji	<b>4540</b>	620.000.000	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Rembang	Jumlah kendaraan yang diuji	<b>4540</b>	620.000.000	

2.15.2.20 5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	50.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	50.000.000	
2.15.2.20 5.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	
2.15.2.20 5.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9823 Unit		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9823 Unit		
2.15.2.20 5.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	200.000.000	
2.15.2.20 5.5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	50.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	50.000.000	
2.15.2.20 5.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	200.000.000	

2.15.2.20 5.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	
2.15.2.20 5.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	70.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	70.000.000	
<b>2.15.2.206</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<b>4 Kali</b>	1.060.000.000	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<b>4 Kali</b>	1.060.000.000	
2.15.2.20 6.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	100.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	100.000.000	
2.15.2.20 6.16	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Rembang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	140 Dokumen	50.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Rembang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	140 Dokumen	50.000.000	

	Lintas		Rekayasa Lalu Lintas			Lintas		Rekayasa Lalu Lintas			
2.15.2.20 6.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.000.000	
2.15.2.20 6.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	400 Laporan	850.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	400 Laporan	850.000.000	
2.15.2.20 6.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	10.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	10.000.000	
<b>2.15.2.2 07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<b>3 kali</b>	90.000.000	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<b>3 kali</b>	90.000.000	

2.15.2.20 7.3	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rembang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	20.000.000	
2.15.2.20 7.5	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rembang	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rembang	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	30.000.000	
2.15.2.20 7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	20.000.000	
62.15.2.2 07.6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	20.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	20.000.000	
<b>2.15.2.2 08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<b>2 kali</b>	60.000.000	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<b>2 kali</b>	60.000.000	
2.15.2.20 8.3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	10.000.000	
2.15.2.20 8.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan		

	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
2.15.2.20 8.6	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan		
2.15.2.20 8.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		
2.15.2.20 8.8	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rembang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rembang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	50.000.000	
2.15.2.20 8.9	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana	Rembang	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana	Rembang	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		

	Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
<b>2.15.2.209</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>2 Macam</b>	250.000.000	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>2 Macam</b>	250.000.000	
2.15.2.209.2	Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	
2.15.2.209.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	200.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	200.000.000	

2.15.2.2 10	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	<b>1 kali</b>	-	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	<b>1 kali</b>	-	
----------------	---	---------	---	---------------	---	---	---------	---	---------------	---	--

2.15.2.21 0.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men		
2.15.2.21 0.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men		
<b>2.15.2.2 11</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Remba ng	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 kali</b>	200.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 kali</b>	200.000.000	
2.15.2.21 1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku men	100.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Remba ng	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Doku men	100.000.000	

2.15.2.21 1.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.15.2.21 1.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
<b>2.15.2.2 12</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 kali</b>	70.000.000	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 kali</b>	70.000.000	
2.15.2.21 2.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	

2.15.2.21 2.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
<b>2.15.2.2 14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>3 macam</b>	-	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>3 macam</b>	-	
2.15.2.21 4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		

2.15.2.21 4.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan		
<b>2.15.2.2 15</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>3 macam</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>3 macam</b>		
2.15.2.21 5.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit		

2.15.2.21 5.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		
<b>2.15.2.2 16</b>	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 macam</b>	200.000.000	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1 macam</b>	-	
2.15.2.21 6.1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		

2.15.2.21 6.2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
2.15.2.21 6.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

1. Proses Perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang saat ini telah mengarah pada perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat desa atau kelurahan antar kecamatan, dalam perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten.
2. Dalam praktek penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang saat ini telah banyak mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan dari kelompok para pemangku kebijakan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan lokasi penempatan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
3. Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja SKPD satu tahun sebagai rujukan dokumen Renstra SKPD yang disinergikan dengan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil sinegritas usulan Musrenbang kecamatan dengan usulan SKPD dijadikan sebagai dokumen draf Renja SKPD. Untuk menghasilkan dokumen draf Renja SKPD yang informatif,

dilakukan serangkaian kegiatan rapat kerja yang melibatkan faktor internal. Sebelum menjadi Draft Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang kompilasi hasil usulan musrenbang kecamatan, untuk kemudian dipilah berdasarkan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Mengkompilasi dan memilah usulan tersebut juga diperiksa terlebih dahulu apakah usulan kegiatan dari musrenbang kecamatan tumpang-tindih dengan pembahasan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atau tidak.

4. Renja yang telah dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang dan SKPD yang lain kemudian dibawa dalam suatu diskusi panel. Diskusi panel tersebut selain dihadiri oleh semua SKPD juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan dan *stakeholder* lainnya. Dalam diskusi panel tersebut dipaparkan mengenai isu strategis masing-masing SKPD berdasarkan renstra SKPD serta target capaian RPJMD. Dari diskusi panel tersebut, diharapkan semua *stakeholder* dapat memahami secara komprehensif mengenai isu strategis yang dikaitkan dengan Renja SKPD serta keterkaitan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Rembang**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>X.XX.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rembang	Nilai SAKIP OPD	<b>72</b>	
		Rembang	IKM	<b>86,76</b>	
<b>X.XX.1.201</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	
X.XX.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
<b>X.XX.1.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
<b>X.XX.1.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rembang	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	12 laporan	
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
X.XX.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	

X.XX.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
X.XX.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
X.XX.1.206.7	Penyediaan Bahan/Material	Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 paket	
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
<b>X.XX.1.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rembang	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	11 unit	
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	
<b>X.XX.1.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 laporan	
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
X.XX.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
<b>X.XX.1.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rembang	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	20 unit	
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rembang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	
X.XX.1.209.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rembang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	
X.XX.1.209.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rembang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	

X.XX.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Rembang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
X.XX.1.209.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	
X.XX.1.209.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rembang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
X.XX.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
X.XX.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	
X.XX.1.209.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rembang	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	Rembang			
<b>2.15.2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rembang	<b>Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>85,71%</b>	
		Rembang	<b>Persentase kendaraan laik jalan</b>	<b>56,78%</b>	
		Rembang	<b>Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan</b>	<b>100%</b>	
		Rembang	<b>Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola</b>	<b>35,00%</b>	
		Rembang	<b>Persentase Lalulintas berkeselamatan</b>	<b>77%</b>	
		Rembang	<b>Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana</b>	<b>20,00%</b>	
		Rembang	<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>20,00%</b>	
<b>2.15.2.201</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 kali	
2.15.2.201.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

2.15.2.201.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2.15.2.201.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	
<b>2.15.2.202</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	7 Macam	
2.15.2.202.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	
2.15.2.202.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1540 unit	
2.15.2.202.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rembang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	
2.15.2.202.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	748 unit	
<b>2.15.2.203</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	3 Terminal	
2.15.2.203.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	
2.15.2.203.2	Pembangunan Gedung Terminal	Rembang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	
2.15.2.203.3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	
2.15.2.203.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rembang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	
2.15.2.203.5	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	12 Orang	
<b>2.15.2.204</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Kali	

2.15.2.204.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	
2.15.2.204.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	
<b>2.15.2.205</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Rembang	Jumlah kendaraan yang diuji	4540	
2.15.2.205.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	
2.15.2.205.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
2.15.2.205.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9823 Unit	
2.15.2.205.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	
2.15.2.205.5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	
2.15.2.205.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	
2.15.2.205.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	
2.15.2.205.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	
<b>2.15.2.206</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Kali	

2.15.2.206.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	
2.15.2.206.16	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rembang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	140 Dokumen	
2.15.2.206.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	
2.15.2.206.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	400 Laporan	
2.15.2.206.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	
<b>2.15.2.207</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 kali	
2.15.2.207.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	
2.15.2.207.5	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rembang	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	
2.15.2.207.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	
62.15.2.207.6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	
<b>2.15.2.208</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2 kali	
2.15.2.208.3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	

2.15.2.208.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	
2.15.2.208.6	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	
2.15.2.208.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	
2.15.2.208.8	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rembang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	
2.15.2.208.9	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	
<b>2.15.2.209</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Macam	
2.15.2.209.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
2.15.2.209.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	
<b>2.15.2.210</b>	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1 kali	

2.15.2.210.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.15.2.210.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
<b>2.15.2.211</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	
2.15.2.211.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2.15.2.211.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
<b>2.15.2.212.3</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.15.2.212	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	
2.15.2.212.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2.15.2.212.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.15.2.214	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 macam	

2.15.2.214.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	
2.15.2.214.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	
2.15.2.215	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 macam	
2.15.2.215.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit	
2.15.2.215.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.15.2.216	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 macam	
2.15.2.216.1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

2.15.2.216.2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2.15.2.216.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	
<b>2.15.2.215.3</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit	
2.15.2.215.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	
2.15.2.216	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 macam	
2.15.2.216.1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

**BAB III**  
**TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN,**  
**DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang yang berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting peningkatan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat untuk kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan harga terjangkau sehingga memenuhi prinsip *good governance*.

Menyikapi visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” guna mewujudkan visi dimaksud diatas. Adapun misi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia/ SDM, dan penegakan hukum secara konsisten
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien

yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera. Sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya peningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/ SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendekatan pembangunan wilayah dilakukan dengan cara menerapkan sistem kewilayahan dengan membagi wilayah perencanaan menjadi beberapa kawasan yang memiliki keterkaitan secara fungsional. Pembangunan ekonomi dengan mengedepankan sektor dan komoditas unggulan berbasis wilayah merupakan upaya pematapan dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan, sehingga dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur eksisting ditambah dengan infrastruktur tambahan guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya masih belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan

serta memajukan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah. Pendekatan ini diterapkan pada kawasan “Banglor” meliputi Kabupaten Rembang dan Blora serta kawasan Wanarakuti yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara sebagai Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Kedungsepur.

### **3.2 Tujuan, Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang**

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui tujuh misi, maka dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2021-2026 sebagai berikut:

#### **3.2.1. Tujuan OPD**

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur

#### **3.2.2. Indikator Tujuan OPD**

1. Nilai SAKIP
2. Indeks pelayanan publik
3. Indeks Konektivitas

#### **3.2.3. Sasaran OPD**

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
2. Terjaminnya ketersediaan kelengkapan jalan
3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan
4. Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan

#### **3.2.4. Indikator Sasaran OPD**

1. Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)

2. Indeks perkembangan ketersediaan kelengkapan Jalan
3. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perhubungan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
					TAHUN KE-						
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		nilai SAKIP		67	70	67	70	72	75	80
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,1	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	%	69,52	70	69,52	70	71	72	73
3	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas		Indeks Konektivitas	%	28,07	36,35	28,07	36,35	46,71	62,25	71,62
		Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	28,57	42,86	28,57	42,86	57,14	85,71	100
		Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	27,34	35,84	27,34	35,84	47,17	63,21	71,7
		Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	%	28,58	30,69	28,58	30,69	36,3	38,48	43,9

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
					TAHUN KE-						
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		nilai SAKIP				67	70	72	75	80
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		indeks pelayanan publik	%			3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik		%			69,52	70	71	72	73
		Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan Jalan	%			28,07	36,35	46,71	62,25	71,62
		Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%			28,57	42,86	57,14	85,71	100
		Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	%			27,34	35,84	47,17	63,21	71,7

### **3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Program Kegiatan Tahun 2025**

#### URUSAN UMUM/ SEKRETARIAT

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, Indikator Nilai SAKIP OPD, target 72 dan Ikm, Target 86,76**

##### **1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah, target 4 dokumen**

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, indikator Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun, 2 dokumen
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 4 Laporan
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 4 Laporan
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 1 dokumen**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, 60 orang
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Jumlah administrasi keuangan yang tersedia, 12 Dokumen

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik, 1 Laporan

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik, 2 dokumen**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, 1dokumen
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Jumlah Dokumen BMD, 1 dokumen

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, 2 sub kegiatan**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, 110 orang
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, jumlah pengadaan pakaian PDH, PDL, olahraga, 110 orang

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana, 9 sub kegiatan**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 20 jenis barang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Penyediaan Peralatan, 5 jenis barang
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 26 jenis barang
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 4 jenis penyediaan mamin kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 2 jenis penyediaan (barang cetak dan penggandaan)
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 1 jenis penyediaan
7. Penyediaan Bahan/Material, Jumlah Penyediaan Bahan/Material, 60 jenis barang ATK

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu, 2 jenis penyediaan fasilitasi tamu (akomodasi dan penginapan)
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 12 Laporan

**6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur, 9 sub kegiatan**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
3. Pengadaan Alat Besar, Jumlah Pengadaan Alat Besar, 1 jenis kendaraan
4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, 1 jenis kendaraan
5. Pengadaan Mebel, Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan, 3 unit
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, 8 unit
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 1 jenis gedung kantor
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 5 jenis sarpras kantor
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 5 jenis sarpras pendukung kantor

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, 3 sub kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat yang tersedia, 12 Laporan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 12 Laporan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 12 Laporan

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik, 6 sub kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, 37 Kendaraan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, 37 kendaraan
3. Pemeliharaan Mebel, Jumlah Pemeliharaan Mebel, 2 jenis barang (bahan kayu dan besi ringan)
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, 10 unit
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, 1 jenis bangunan
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi, 2 unit

## URUSAN TEKNIS / BIDANG

### **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ),**

**Indikator Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, (Formulasi =Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan, target  $(6/7)*100\%=85,71\%$**

#### **1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,**

**Indikator Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia, target 2025 7 macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU, TL, WL, marka, *guardril*, halte, rambu) dan Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara, target 2025 7 macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU, TL, WL, marka, *guardril*, halte, rambu)**

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun, unit
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia, 1540 Unit
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, unit
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, 748 Unit

**Indikator Persentase kendaraan laik jalan. (Formulasi = jumlah KBWU yang uji / jumlah KBWU x 100 %), target 2025  $=(5522/9726)*100\% =56,78\%$**

#### **2. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah kendaraan yang diuji, 5522 (dari KBWU 9726)**

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 7 Unit
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sumber Daya

Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Orang

3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar, 9823 unit
4. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5000 Dokumen
5. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2 Laporan
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 4 unit
7. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, 1 Laporan
8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2 Laporan

**Indikator Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan (Formulasi =macam penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan + macam Penetapan Wilayah Operasi + macam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang + macam penerbitan izin Angkutan Taksi + macam penetapan kelas tarif ekonomi utk angkota dan angkudes / 5 x 100 %), target 2025  $((2/2)+(2/2)+(4/4)+(4/4)+(2/2))/5 = (1+1+1+1+1)/5 = 5/5 = 1 * 100 = 100%$**

- 3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 macam dari 2 macam**

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota, Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia, 10 unit

2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang, Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, 1 Laporan

**4. Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 macam wilayah dari 2 macam wilayah**

1. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumen
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumen

**5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning),**

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Laporan
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, Laporan

**6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)**

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Unit
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumentasi

**7. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang**

**Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes)**

1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dokumen
2. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dokumen
3. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 Laporan

**Indikator Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola, (Formulasi = jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C+ jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir / 2 X 100 %), target 2025 = (3/6+1/5)/2\*100%=35,00%**

**8. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola, 3 terminal dari 6 terminal tipe C**

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun, Dokumen
2. Pembangunan Gedung Terminal, Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun, Unit
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan, 1 Unit

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara, 2 Unit
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C, Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya, 12 Orang

**9. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, 3 tempat/kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun)**

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dokumen
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan

**Indikator Persentase Lalulintas berkeselamatan (Formulasi = jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ+jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas+Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)/3x100%, target 2025 =(3/4 + 4/5 + 3/4)/3\*100%= (0,75+0,8 +0,75)/3= 2,3/3\*100% = 76,6%**

**10. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, 3 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ**

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen

2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, 1 Dokumen
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, 1 Laporan

**11. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 4 kali dari 5 kali Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 1 Laporan
2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 140 Dokumen
3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 3 Dokumen
4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, 400 laporan
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 3 Laporan

**12. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, 3 kali dari 4 kali Persetujuan**

### **Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan, 4 Dokumen
2. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin, Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya, 2 orang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, 2 Laporan
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi, 4 laporan

**Indikator Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana (Formulasi= jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan+jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah+jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan / 3 x 100%), target 2025 =  $(1/5+1/5+1/5)/3*100\%=20,00\%$**

### **13. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 kali
2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 1 kali
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah, 5 kali ( 1 kali setahun)

**14. Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumen
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumen

**15. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 5 kali (setahun 1 kali) penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, 1 Dokumen
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Dokumen

**Indikator Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ (Formulasi = Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi**

**Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan / jumlah Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang direncanakan X 100%), target 2025  $(2/10)*100%=20,00\%$**

**16. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, 10 kali (setahun 2 kali) pelaksanaan**

1. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ, Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Orang
2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Laporan
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, 5 Laporan
4. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, Laporan
5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Laporan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rancangan Awal Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 terdiri dari 2 program, 16 kegiatan dan 85 sub kegiatan / pekerjaan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								Kinerja	
	DINAS PERHUBUNGAN				<b>30.418.000.000</b>			<b>30.418.000.000</b>	
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Rembang	75	22.423.000.000			80	22.423.000.000
		IKM	Rembang	86,76				88,3	
X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	4 Dokumen	50.000.000			4 Dokumen	50.000.000
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rembang	2 Dokumen	15.000.000	PAD		2 Dokumen	15.000.000
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rembang	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	4 Laporan	10.000.000	PAD		4 Laporan	10.000.000
X.XX.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	4 Laporan	15.000.000	PAD		4 Laporan	15.000.000

X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rembang	1 Dokumen	5.290.000.000			1 Dokumen	5.290.000.000
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	60 Orang/bulan	5.000.000.000	PAD		60 Orang/bulan	5.000.000.000
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	12 Dokumen	280.000.000	PAD		12 Dokumen	280.000.000
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
X.XX.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	Rembang	12 laporan	398.000.000			12 laporan	398.000.000
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rembang	20 paket	10.000.000	PAD		20 paket	10.000.000
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rembang	5 Paket	15.000.000	PAD		5 Paket	15.000.000
X.XX.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rembang	26 paket	20.000.000			26 paket	20.000.000
X.XX.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rembang	4 Paket	40.000.000	PAD		4 Paket	40.000.000
X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rembang	2 Paket	65.000.000	PAD		2 Paket	65.000.000
X.XX.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rembang	12 Dokumen	8.000.000	PAD		12 Dokumen	8.000.000
X.XX.1.206.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rembang	60 paket	40.000.000	PAD		60 paket	40.000.000
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	12 Laporan	200.000.000	PAD		12 Laporan	200.000.000

X.XX.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	Rembang	1 unit	200.000.000			1 unit	200.000.000
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rembang	8 unit	200.000.000	PAD		8 unit	200.000.000
X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rembang	12 laporan	16.210.000.000			12 laporan	16.210.000.000
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	12 Laporan	10.000.000			12 Laporan	10.000.000
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rembang	12 Laporan	15.000.000.000	PAD		12 Laporan	15.000.000.000
X.XX.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rembang	Laporan		PAD		Laporan	
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rembang	12 Laporan	1.200.000.000	PAD		12 Laporan	1.200.000.000
X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	Rembang	20 unit	275.000.000			20 unit	275.000.000
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rembang	37 Unit	200.000.000	PAD		37 Unit	200.000.000
X.XX.1.209.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Rembang	Unit		PAD		Unit	

X.XX.1.209.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rembang	10 Unit	25.000.000	PAD		10 Unit	25.000.000
X.XX.1.209.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rembang	2 Unit	50.000.000	PAD		2 Unit	50.000.000
X.XX.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rembang	Unit		PAD		Unit	
X.XX.1.209.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rembang	Ha		PAD		Ha	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	86%	7.995.000.000			100%	7.995.000.000
		Persentase kendaraan laik jalan	Rembang	57%				78%	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	Rembang	100%				100%	
		Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	Rembang	35%				35%	

		Persentase Lalulintas berkeselamatan	Rembang	77%				93%	
		Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	Rembang	20%				20%	
		Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Rembang	20%				20%	
2.15.2.201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	3 kali	200.000.000			3 kali	200.000.000
2.15.2.201.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	100.000.000	DBH		1 Dokumen	100.000.000
2.15.2.201.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	50.000.000	DBH		1 Dokumen	50.000.000
2.15.2.201.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	1 Laporan	50.000.000	DBH		1 Laporan	50.000.000
2.15.2.202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Rembang	7 Macam	4.800.000.000			7 Macam	4.800.000.000
2.15.2.202.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rembang	Unit		DBH		Unit	
2.15.2.202.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rembang	1540 unit	3.900.000.000	DBH		1540 unit	3.900.000.000
2.15.2.202.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rembang	Unit		DBH		Unit	
2.15.2.202.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rembang	748 unit	900.000.000	DBH		748 unit	900.000.000
2.15.2.203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	Rembang	3 Terminal	295.000.000			3 Terminal	295.000.000

2.15.2.203.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Rembang	Dokumen		DBH		Dokumen	
2.15.2.203.2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Rembang	Unit		DBH		Unit	
2.15.2.203.9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	1 Unit	80.000.000	DBH		1 Unit	80.000.000
2.15.2.203.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Rembang	2 Unit	180.000.000	DBH		2 Unit	180.000.000
2.15.2.203.10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Rembang	12 Orang	35.000.000	DBH		12 Orang	35.000.000
2.15.2.204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rembang	3 Kali	150.000.000			3 Kali	150.000.000
2.15.2.204.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Dokumen		DBH		Dokumen	
2.15.2.204.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	1 Laporan	150.000.000	DBH		1 Laporan	150.000.000
2.15.2.205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Rembang	4540	620.000.000			4540	620.000.000

2.15.2.205.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Rembang	7 Unit	50.000.000	DBH		7 Unit	50.000.000
2.15.2.205.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rembang	Orang	-	DBH		Orang	-
2.15.2.205.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Rembang	9823 Unit		DBH		9823 Unit	
2.15.2.205.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	5000 Dokumen	200.000.000	DBH		5000 Dokumen	200.000.000
2.15.2.205.5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	2 Laporan	50.000.000	DBH		2 Laporan	50.000.000
2.15.2.205.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Rembang	4 Unit	200.000.000	DBH		4 Unit	200.000.000
2.15.2.205.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	1 Laporan	50.000.000	DBH		1 Laporan	50.000.000
2.15.2.205.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	2 Laporan	70.000.000	DBH		2 Laporan	70.000.000
2.15.2.206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	4 Kali	1.060.000.000			4 Kali	1.060.000.000
2.15.2.206.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Rembang	1 Laporan	100.000.000	DBH		1 Laporan	100.000.000

2.15.2.206.16	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rembang	140 Dokumen	50.000.000	DBH		140 Dokumen	50.000.000
2.15.2.206.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	3 Dokumen	50.000.000	DBH		3 Dokumen	50.000.000
2.15.2.206.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	400 Laporan	850.000.000	DBH		400 Laporan	850.000.000
2.15.2.206.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	3 Laporan	10.000.000	DBH		3 Laporan	10.000.000
2.15.2.207	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rembang	3 kali	90.000.000			3 kali	90.000.000
2.15.2.207.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	2 Laporan	20.000.000	DBH		2 Laporan	20.000.000
2.15.2.207.5	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rembang	2 Orang	30.000.000	DBH		2 Orang	30.000.000
2.15.2.207.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	2 Laporan	20.000.000	DBH		2 Laporan	20.000.000
62.15.2.207.6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Rembang	4 Laporan	20.000.000	DBH		4 Laporan	20.000.000
2.15.2.208	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rembang	2 kali	60.000.000			2 kali	60.000.000
2.15.2.208.3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	5 Laporan	10.000.000	DBH		5 Laporan	10.000.000

2.15.2.208.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.208.6	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.208.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.208.8	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Rembang	1 Orang	50.000.000	DBH		1 Orang	50.000.000
2.15.2.208.9	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	2 Macam	250.000.000			2 Macam	250.000.000

2.15.2.209.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rembang	1 Laporan	50.000.000	DBH		1 Laporan	50.000.000
2.15.2.209.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rembang	10 Unit	200.000.000	DBH		10 Unit	200.000.000
2.15.2.210	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Rembang	1 kali	-			1 kali	-
2.15.2.210.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Dokumen		DBH		Dokumen	
2.15.2.210.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Dokumen		DBH		Dokumen	
2.15.2.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 kali	200.000.000			1 kali	200.000.000

2.15.2.211.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	100.000.000	DBH		1 Dokumen	100.000.000
2.15.2.211.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	50.000.000	DBH		1 Dokumen	50.000.000
2.15.2.211.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	50.000.000	DBH		1 Dokumen	50.000.000
2.15.2.212	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 kali	70.000.000			1 kali	70.000.000
2.15.2.212.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	50.000.000	DBH		1 Dokumen	50.000.000
2.15.2.212.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	20.000.000	DBH		1 Dokumen	20.000.000
2.15.2.214	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	3 macam	-			3 macam	-

2.15.2.214.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.214.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Laporan		DBH		Laporan	
2.15.2.215	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	3 macam				3 macam	
2.15.2.215.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Rembang	Unit		DBH		Unit	
2.15.2.215.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang	Dokumen		DBH		Dokumen	

2.15.2.216	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 macam	200.000.000			1 macam	200.000.000
2.15.2.216.1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	100.000.000	DBH		1 Dokumen	100.000.000
2.15.2.216.2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Dokumen	50.000.000	DBH		1 Dokumen	50.000.000
2.15.2.216.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	1 Laporan	50.000.000	DBH		1 Laporan	50.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan rancangan awal rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam bidang perhubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan menyempurnakan Renja berdasarkan Surat Edaran Bupati Rembang dan hasil dari Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.